

BAB II

SARA DAN PILGUB DKI JAKARTA 2017 : SEBUAH TINJAUAN UMUM

A. *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough

Norman Fairclough adalah orang pertama yang mempopulerkan analisis wacana kritis.¹ Analisis Fairclough berusaha membangun sebuah model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam lingkup sosial budaya. Ia juga mengkombinasikan tradisi analisis tekstual yang melihat bahasa dalam ruang tertutup pada konteks masyarakat yang lebih luas. Lebih-lebih, titik perhatian Fairclough terletak pada bahasa yang menimbulkan praktik-praktik kekuasaan. Tujuannya untuk melihat bagaimana pemakaian bahasa membawa nilai-nilai ideologis kepada masyarakat atau khalayak (pembaca teks), sebab menurutnya konsepsi bahasa semacam ini membawa konsekuensi tertentu terhadap khalayak. Menurut Fairclough, bahasa secara sosial dan historis dimaknai sebagai bentuk tindakan, dalam hubungan dialektik disusunan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, analisis Fairclough akan lebih memusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk oleh hubungan sosial masyarakat,

¹ Secara etimologis, kata 'wacana' berawal sejak abad ke-14. Kata ini diambil dari kata Latin 'discursus' yang berarti 'percakapan' (McArthur, 1996). Dalam penggunaannya saat ini, istilah ini menyampaikan sejumlah makna penting yang mempunyai berbagai maksud. Yang semuanya berkaitan dengan bahasa: teks, konteks, ideologi, relasi kuasa, dsb. Lihat Eriyanto. Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001) Hlm, 7.

Norman Fairclough mencoba mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik terhadap pemikiran sosial dan politik yang menghubungkan dengan perubahan sosial. Oleh karena itu, model yang digagas Fairclough disebut model perubahan sosial (*Social Change*).

Fairclough sendiri membagi analisis wacana menjadi tiga dimensi yang memiliki karakteristik berbeda: (1) *teks*, (2) *discourse practice*, dan (3) *sociocultural practice*. Seluruh elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah berikut. *Pertama*, representasi yang ingin ditampilkan dalam teks, yang umumnya membawa muatan ideologis tertentu. *Kedua*, relasi, merujuk pada analisis bagaimana konstruksi hubungan antara wartawan dengan khalayak atau pembaca, seperti apakah teks disampaikan secara informal atau formal, terbuka atau tertutup. *Ketiga*, identitas, merujuk pada bagaimana identitas personal wartawan yang memproduksi berita yang dipercaya berpengaruh terhadap bagaimana ia menyampaikan pesan atau informasi tersebut terhadap khalayak.

1. Teks

Setiap teks pada dasarnya, menurut Fairclough, dapat diuraikan dan dianalisis dari tiga elemen dasar. *Pertama*, Representasi, yaitu bagaimana sebuah peristiwa, individu, kelompok, kondisi, atau apa pun ditampilkan dalam teks. *Kedua*, Relasi atau hubungan, yaitu bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita

ditampilkan dalam teks. *Ketiga*, Identitas, adalah bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dalam teks.

Menurutnya, sebuah teks bukan hanya menampilkan bagaimana suatu objek digambarkan, tetapi juga bagaimana hubungan antarobjek didefinisikan dalam teks.

2. Discourse Practice

Discourse practice memusatkan fokus pada produksi teks dan konsumsi teks. Teks menurut Fairclough sengaja dibentuk melalui sebuah praktik diskursus, yang akan menentukan bagaimana teks tersebut di produksi.

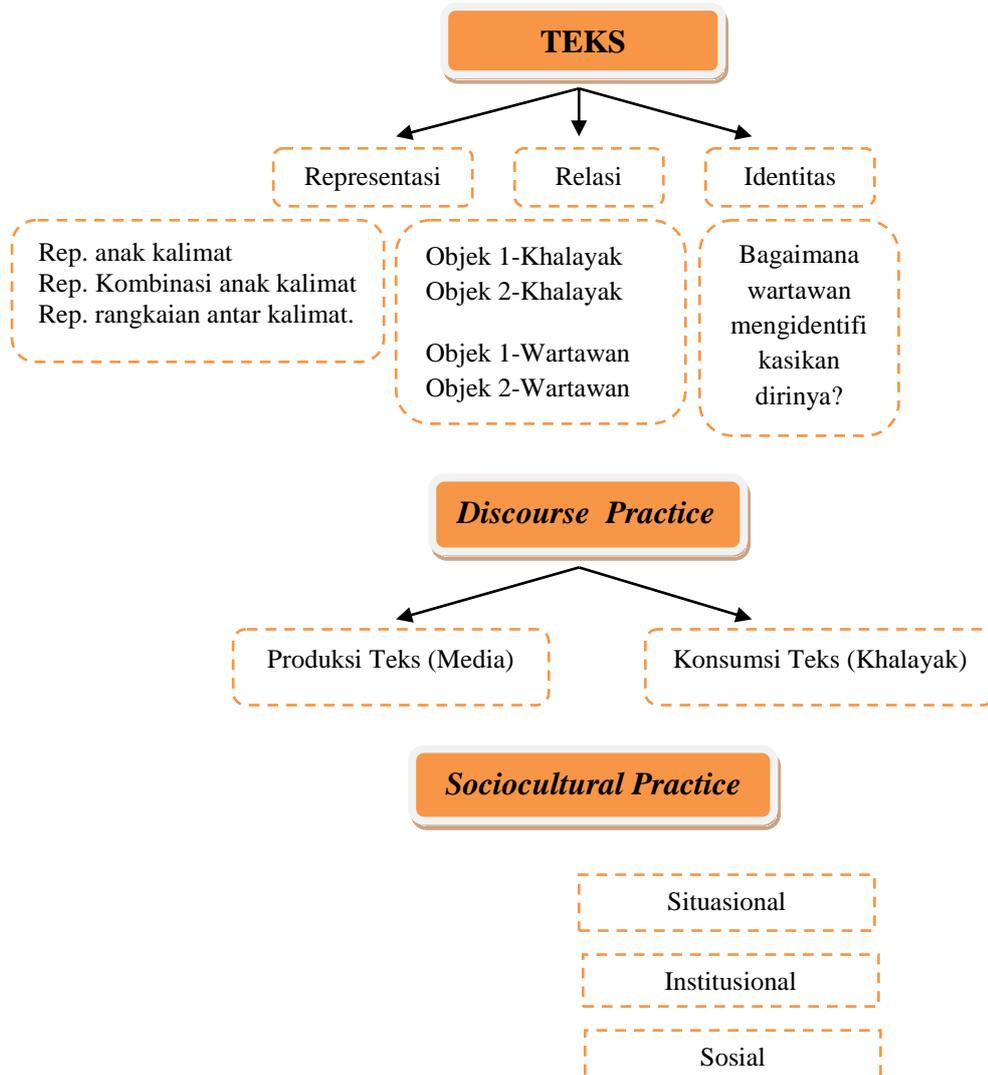
Fenomena tersebut sama halnya juga terjadi di media. Setiap teks berita menurut Fairclough selalu melibatkan praktik diskursus yang kompleks. Praktik diskursus ini yang akan menentukan bagaimana proses dan hasil dari teks tersebut terbentuk. Dalam pandangan Fairclough, ada dua sisi dari praktik diskursus tersebut, yaitu produksi teks (media) dan konsumsi teks (khalayak).

3. Sociocultural Practice

Sociocultural practice disandarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media memengaruhi bagaimana wacana yang muncul setelah diproduksi dalam media. Ruang redaksi atau wartawan bukanlah ruang kosong yang bersih dan steril, tetapi sangat ditentukan oleh faktor di luar dirinya. *Sociocultural practice* ini memang tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi tidak kalah

pentingnya sebab *Sociocultural practice* yang akan menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami oleh khalayak.²

Bagan 1.1
Konsep Pemikiran Norman Fairclough



² Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001) Hlm, 286-321.

B. Konsep Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)

SARA adalah akronim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, yang berkembang di masyarakat. SARA juga bisa dimaknai sebagai tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan yang bersifat multi perspektif. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri atau golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA.³ Dalam pengertian lain, SARA dapat disebut dengan diskriminasi yang merujuk kepada tindakan tidak adil terhadap individu ataupun kelompok tertentu. Biasanya, beragam peristiwa diskriminasi ini disebabkan kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain.

SARA Dapat Digolongkan Dalam Tiga Katagori: Kategori *pertama* yaitu Individual, adalah tindakan SARA yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan ataupun menghina identitas diri maupun golongan, dapat dikatakan sebagai kategori ini. Kategori *kedua* yaitu Institusional, merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya. Sedangkan, kategori *ketiga* yaitu Kultural, berupa

³ <https://www.coursehero.com/file/16799209/definisi-sara/>. Diakses pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 pukul 10.45 WIB.

penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya di dalam masyarakat.⁴

1. Pemaknaan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan Versi Negara

Beberapa saat yang lalu, telah terjadi serentetan konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Seperti yang terjadi pada penghujung tahun 2018 kemarin di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Terjadi saling serang-menyerang menggunakan berbagai jenis senjata tajam, seperti parang, tongkat dan batu. Pemicu konflik ini berawal dari perkelahian pengunjung salah satu kafe remang-remang yang mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu kelompok suku di sana.⁵ Selanjutnya konflik mengenai suku disusul oleh konflik antar suku yang terjadi di Mali. Konflik ini ditengarai kekerasan antara suku Fulani dan kelompok-kelompok saingannya yang telah memperburuk situasi keamanan di kawasan gurun di Mali. Daerah tersebut digunakan sebagai pangkalan oleh para kelompok garis keras, yang diduga memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS.⁶ Sampai data ini ditulis, dilansir dari kompas.com sekarang korban konflik antara suku

⁴ Benny Sumardiana, "Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.11, No.1. Juni 2016.

⁵ <https://sultrakini.com/berita/123932> Diakses hari minggu pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 02.18 WIB.

⁶ <https://www.liputan6.com/global/read/3861242/konflik-antar-suku-di-mali-37-warga-sipil-tewas-termasuk-anak-anak> Diakses pada hari minggu tanggal 25 Maret 2019 pukul 02.21 WIB.

di Mali yang merambah pada pembunuhan ini mencapai 115 penduduk desa yang tewas.⁷

Atau contoh yang berhubungan, dalam catatan penulis, tidak ada kekerasan berbasis etnis paling tragis dalam sejarah Nusantara kecuali yang dialami Tionghoa. Setelah diizinkan mendiami wilayah kerajaan Mataram sekitar tahun 1683 imigran Tionghoa membuktikan diri sebagai orang yang dapat bekerja keras. Dalam pandangan Jenderal Johan van Hoorn (1653-1711), orang Jawa dikenal baik hati menjadi lebih pandai dan rajin akibat interaksi dengan mereka. Namun akibat ulah segelintir Tionghoa yang berkolusi dengan elit kerajaan, banyak orang Jawa yang tidak suka dengan etnis ini kelak dikemudian hari.⁸

Beberapa konflik di atas adalah sedikit dari sekian banyak konflik yang berangkat dari perbedaan agama, etnis atau kelompok di Indonesia, setelah beberapa sejarah kelam Indonesia, seperti konflik Dayak dan Madura, warga Tionghoa dan Konflik Moneter 1998, peristiwa tragis Ambon dan lain-lain. Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 pun ternyata mengulang sejarah kelam yang sama. Agama dan etnis diolah habis demi untuk memenangkan salah satu calon pemimpin.

⁷<https://internasional.kompas.com/read/2019/03/24/09341551/115-penduduk-desa-di-mali-tewas-dibantai-suku-pemburu-dogon> Diakses pada hari minggu tanggal 25 Maret 2019 pukul 02.22 WIB.

⁸ Aan Anshori dkk, *"Kota Santri Kota (in) Toleransi Karya Reflektif Terpilih Anak Muda Lintas Iman"*, (Jombang: Infictus Jombang, 2016) lampiran.

Salah satu bukti rekam sejarah yang sempat menggambarkan Negara Indonesia adalah peristiwa “Aksi Bela Islam” yang dilakukan oleh kelompok penganut agama Islam. Aksi ini dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) sebuah organisasi yang mengusung pandangan Islam konservatif. Dalam basis gerakannya, FPI menjadi salah satu pelopor aksi-aksi gerakan Islam di Indonesia. Tindakan FPI yang kontroversial sejak tahun 1998 sering mendapatkan kritikan dari berbagai pihak karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Aksi bela Islam yang melibatkan ribuan massa ini dianggap aksi besar-besaran yang benuansa politik. Seperti yang diketahui, aksi ini bermula dari salah satu pasangan calon gubernur a.k.a Basuki Tjahya Purnama (Ahok) (baca: Etnis Tionghoa) yang sebelumnya terseret kasus penistaan agama, dimana sangat bertepatan dengan menjelang momentum Pilkada di Indonesia. Berikut tabel “kronologi Aksi Bela Islam”:

Tabel 1.2

Tabe; Kronologi Peristiwa “Aksi Bela Islam”

Aksi	Tanggal	Kronologi
Aksi Bela Islam Jilid I (Suara.com)	14 Oktober 2016	Setelah salat jumat, ribuan orang dari Ormas Islam yang dikomandoi oleh FPI melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Dalam aksinya tersebut, mereka menuntut agar penyelidikan atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera dilakukan.

		Mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar dan jumlah massa yang lebih banyak jika tidak kunjung merespon tuntutan ini dalam 3 minggu berikutnya. ⁹
Aksi Bela Islam Jilid II (Cnnindonesia.com Detik news Voaindonesia.com)	4 November 2019 (Aksi Damai 411)	Aksi ini dimulai usai salat Jumat yang berpusat di depan Istana Negara. Selain di Jakarta, aksi serupa juga diadakan di beberapa kota lainnya, diantaranya Batam, Semarang, Pekanbaru, Palembang, Makassar, Banjarmasin. Sama dengan tuntutan massa di Jakarta, mereka mendesak kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok segera dituntaskan. ¹⁰ Di Jakarta, perwakilan dari pengunjuk rasa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Menkopolkam, Wiranto dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla untuk mendiskusikan jalan keluar kasus tersebut. ¹¹ Kemudian selang dari itu aparat kepolisian meminta para pengunjuk rasa agar dapat membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi himbauan itu tidak digubris para pengunjuk rasa. Mereka tetap bersikeras untuk bertahan sampai tuntutan mereka terpenuhi. Puncaknya, usai kumandang adzan Isya, suasana menjadi semakin memanas. Di dekat barikade polisi,

⁹<https://www.suara.com/news/2016/10/14/172957/demo-ormas-islam-bubar-sebelum-pergi-rizieq-keluarkan-ancaman>, diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 20.28 WIB.

¹⁰<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161104160100-20-170328/selain-jakarta-sejumlah-daerah-juga-gelar-aksi-tolak-ahok?>, diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 20.43 WIB.

¹¹<https://news.detik.com/berita/d-3337818/wapres-jk-bertemu-perwakilan-massa-demo-4-november>, diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 20.46 WIB.

		<p>sekelompok massa yang dihasut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mulai melakukan penyerangan kepada para aparat yang berjaga.¹²</p> <p>Pukul 21.00 WIB, kondisi mulai kembali stabil. Massa mulai membubarkan diri.¹³¹⁴</p>
<p>Aksi Bela Islam Jilid III (Republika.co.id Okezone.com)</p>		<p>Aksi kali ini diselenggarakan oleh GNPf MUI. Sedangkan Habib Rizieq menyampaikan bahwa aksi ini akan berlangsung dengan damai sebab diadakan dalam bentuk 'ibadah bersama'. Kegiatannya adalah salat Jumat berjamaah di Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin dengan posisi imam di Bundaran HI. Kemudian, dilaksanakan Istighosah, dzikir, dan berdoa untuk keselamatan negeri.¹⁵</p> <p>Di lain itu, Kapolri Tito Karnavian mengancam tidak akan mengeluarkan izin untuk aksi tersebut karena khawatir akan ditunggangi. Setelah terjadi kesepakatan antara pihak GNPf MUI dan kepolisian, aksi ini dapat berlangsung. Dengan kegiatan berdoa dan melakukan salat Jumat bersama. Bahkan dalam aksi ini, presiden Joko Widodo hadir dalam</p>

¹²<https://news.detik.com/berita/d-3339694/kronologi-demo-4-november-dari-damai-hingga-berakhir-ricuh>, di akses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 20.50 WIB.

¹³[https://nasional.kompas.com/read/2016/11/04/12110971/fadli.zon.kalau.ada.yang.mau.minginap.silakan.dpr.rumah.rakyat.kok](https://nasional.kompas.com/read/2016/11/04/12110971/fadli.zon.kalau.ada.yang.mau.menginap.silakan.dpr.rumah.rakyat.kok), diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 20.54 WIB.

¹⁴[https://news.detik.com/berita/d-3337241/fahri-hamzah-izinkan-peserta-demo-4-november-minginap-di-dpr-ini-darurat](https://news.detik.com/berita/d-3337241/fahri-hamzah-izinkan-peserta-demo-4-november-menginap-di-dpr-ini-darurat), diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 20.55 WIB.

¹⁵<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/18/ogtojh382-habib-rizieq-jamin-aksi-bela-islam-iii-berjalan-super-damai>, diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 21.12 WIB.

		acara ini dan disambut hangat oleh para peserta aksi. ¹⁶
Aksi Bela Islam Jilid IV (Tempo.co Bbc.com)	11 Februari 2017	Aksi ini digadang-gadang adalah lanjutan dari aksi bela Islam Jilid I, II, dan III. Sama seperti aksi sebelumnya, aksi ini juga dikoordinasi GNPf MUI. Pada mulanya, aksi yang dikenal dengan aksi 112 ini akan dilaksanakan di Lapangan Monas Jakarta. Tetapi, bentuk acara diubah menjadi dzikir dan tausiah di Masjid Istiqlal Jakarta, setelah Ketua Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab dan pemimpin GNPf-MUI bertemu dengan Menkopolkam Wiranto. ¹⁷ Massa dalam aksi kali ini mulai berdatangan ke lokasi sejak hari Jum'at malam, dan kegiatan dimulai dengan salat tahajud pukul 02.00 WIB, lalu dilanjutkan salat subuh berjamaah, salat duha, dan kegiatan zikir bersama. Dalam aksi ini juga terdapat tausiah dari ulama nasional, dan berakhir setelah melaksanakan salat zuhur berjamaah. Massa aksi ini berjumlah lebih dari 200 ribu orang yang juga dihadiri oleh calon Gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono serta pasangan calon Gubernur DKI dan calon Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. ¹⁸
Aksi Bela Islam Jilid V (Kompas.com)	21 Februari 2017	Lain dari aksi sebelumnya, aksi kali ini digagas oleh Forum Umat Islam

¹⁶<https://news.okezone.com/read/2016/12/02/337/1557026/jalan-kaki-ke-monas-jokowi-salat-jumat-bersama-massa-aksi-damai-212>, diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 21.15 WIB.

¹⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/38940903>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 08.59 WIB.

¹⁸ <https://metro.tempo.co/read/845422/begini-kondisi-massa-aksi-112-di-tengah-guyuran-hujan>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 09.00 WIB.

<p>Bbc.com Poskotanews.com)</p>		<p>(FUI) yang dihadiri oleh Imam Besar Front Pembela Islam, Muhamad Rizieq Shihab. Aksi dimulai pukul 08:00 pagi WIB dalam keadaan hujan. Karena dinilai memiliki muatan politik, dua organisasi keagamaan terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memilih tidak terlibat.¹⁹ Sedangkan tuntutan massa aksi 212 jilid II ini adalah <i>pertama</i>, meminta MPR/DPR melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penonaktifan jabatan Ahok. <i>Kedua</i>, gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai tidak layak tetap menjabat dengan status sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama. <i>Ketiga</i>, meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa, dan secepatnya melakukan penahanan terhadap Ahok.²⁰²¹</p>
		<p>Rencana awalnya, massa dalam aksi ini akan diarahkan untuk berputar melewati Jalan Merdeka Timur dan Jalan Merdeka Selatan.²² Namun, Massa aksi 313 batal berorasi di depan Istana Merdeka. Pengunjuk rasa hanya boleh melakukan <i>longmarch</i> sampai ke kawasan Patung Kuda saja dan berorasi di sana, sebab polisi telah menseterilkan kawasan di sekitar</p>

¹⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39026197>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 09.48 WIB.

²⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/14445901/ini.keputusan.komisi.iii.setelah.temui.massa.aksi.212>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 09.50 WIB.

²¹ <http://poskotanews.com/2017/02/21/komisi-iii-dpr-janji-teruskan-aspirasi-aksi-212-ke-presiden-jokowi/>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 09.51 WIB.

²² <https://www.liputan6.com/news/read/2904995/massa-aksi-31-maret-longmarch-dari-istiglal-ke-istana-merdeka>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 10.14 WIB.

		Istana Merdeka hingga ke Jalan Medan Merdeka Barat. ²³ Disaat yang bertepatan, KH. Ma'ruf Amin datang ke istana negara pukul 14.30 sore WIB atas panggilan presiden Jokowi. ²⁴
--	--	--

Menurut Nono Anwar Makarim, konflik SARA adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling mengerikan. Jumlah korban jiwa dalam konflik ini lebih besar dari pada korban akibat terorisme dan perang antarnegara. Mengutip dari Pauline H Baker dan Angeli E Weller, Makarim menyebutkan bahwa sejak perang dingin berakhir, telah terjadi lebih dari 100 'konflik internal' di dunia.

Definisi konflik internal adalah setiap konflik yang terjadi atas dasar identitas kelompok atau golongan sosial, termasuk bahasa, ras, agama, aliran, suku, kelas sosial, dan kelompok.²⁵ Bahkan menurut sejarah, perkembangan sejarah bangsa Indonesia juga diwarnai sejumlah konflik bernuansa SARA. Tamrin Amal Tomagola berpendapat, konflik SARA di bumi nusantara ini telah terjadi sejak zaman kolonial.²⁶ Bendapat ini kemudian diafirmasi oleh Gerry van Klinken, ia menilai persoalan SARA merupakan warisan pra-kolonial

²³<http://poskotanews.com/2017/03/31/massa-pendemo-313-dilarang-demo-di-depan-istana/>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 10.15 WIB.

²⁴<http://nasional.kini.co.id/2017/03/31/21680/ada-demo-313-presiden-jokowi-menjamu-kh-maruf-amin-di-istana>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 10.16 WIB.

²⁵Sofian Munawar Asgart, "Politisasi SARA: Dari Masa Orba ke Masa Transisi Demokrasi, *Skripsi* telah dibukukan dan diterbitkan ISAC-Jakarta, 2013, h. 1.

²⁶ Buah pikiran Tamrin Amal Tomagola ini disampaikan dalam seminar sehari "Warisan Soeharto: Hambatan Bagi Demokrasi" kerjasama DEMOS-ISAI dan Friedrich Naumann Stiftung, Jakarta: 14 Februari 2002.

khas Melayu yang telah ada sebelum Indonesia ada. Klinken juga berpendapat bahwa pada masa awal kemerdekaan di zaman rezim Orde Lama, konflik SARA sudah muncul ke permukaan. Namun, pada dua masa itu, persoalan SARA muncul secara wajar, dan dianggap sebagai suatu dinamika kultural masyarakat.²⁷

Pengetahuan dan wacana publik tentang pemaknaan SARA, juga tidak luput dari konstruksi politis negara. Tetapi, sebelum membahas lebih jauh mengenai pemaknaan SARA oleh Negara, perlu diingat, dalam tata hukum Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1995) merupakan dasar hukum yang dijadikan sebagai rujukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan kata lain, segala persoalan dan aturan dalam sebuah Negara harus kembali pada Undang-Undang. Berbagai hal pokok dalam Negara diatur dalam undang-undang dasar, dimana Pancasila sebagai falsafah bangsa yang digunakan dalam mengatasi segala problematika kehidupan bernegara. Selain itu, secara substansial Pancasila dan Undang-Undang Dasar memang seharusnya bersinergi, sebagai jati diri bangsa dan pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Senada dengan cerminan pada sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia" mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu, menjaga perdamaian antar individu dan antar kelompok. Dalam sila tersebut jelas disimbolkan pohon beringin yang melambangkan negara yang besar

²⁷ Sofian Munawar Asgart.

dimana rakyatnya bisa berlindung dibawah naungan satu pemerintahan yang kuat.

SARA menurut negara adalah menjadi salah satu sumber perpecahan sosial, maka menjadi suatu realitas yang ditabukan. Selain itu, SARA juga cenderung dilihat berpotensi memicu konflik.²⁸ Terkadang, salah satu sinyalemen umum yang ditanamkan oleh para pejabat negara adalah cenderung menjadikan SARA sebagai faktor tersangka utama dalam menyebabkan teradinya kerusuhan massal. Secara sadar atau tidak, mereka cenderung memahami bahwa Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan merupakan potensi konflik yang setiap saat dapat meledak dengan *trigger* yang bermacam-macam.

Sementara itu, para pengamat sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan pada akhirnya menyepakati bahwa kerusuhan sosial yang terjadi pada umumnya disebabkan dari kesenjangan ekonomi, lembaga peradilan yang kurang mampu mewujudkan keadilan, iklim politik yang kurang demokratis, dan komunikasi politik yang mengalami penyumbatan.²⁹

²⁸ Heru Nugroho, "Dekonstruksi Wacana SARA Negara dan Implikasinya Terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Vol. 1, No. 2. November 1997.

²⁹ Lihat Heru Nugroho.

1. Teori Minoritas Dalam Suku, Agama, Ras dan Antargolongan

Indonesia merupakan salah satu Negara multikultural terbesar di dunia, terbukti dengan kemajemukannya baik dari segi sosio-kultural maupun geografis. Saat ini, jumlah penduduk mencapai 200 juta jiwa, dengan jumlah pulau sekitar 13.000 pulau besar ataupun kecil, 300 suku dan menggunakan 200 bahasa yang berbeda-beda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam. Setiap individu memiliki pandangan yang beragam, hal ini terbukti, tindakan dan wawasan setiap individu yang berbeda terhadap berbagai macam fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik dan terhadap hal-hal lainnya.³⁰

Perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan juga menjadi ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, istilah tersebut sesungguhnya telah diperkenalkan oleh J.S. Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Menurutnya, Masyarakat pada masa itu merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural societies*), yaitu masyarakat yang terdiri dari dua elemen atau lebih yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran di dalam suatu kesatuan politik. Di dalam kehidupan politik, pertanda paling jelas dari masyarakat Indonesia

³⁰ Sependi, *Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah (Pendidikan Tanpa Kekerasan)*, Jurnal Studi Gender dan Anak, dosen PGRA IAIN Pontianak.

yang bersifat mejemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama (*common will*).

Struktur sosial masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri. (1) Secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. (2) Secara vertikal, struktur sosial masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan antara lapisan atas (*up*) dan lapisan bawah (*down*).³¹

Dalam suatu tatanan sosial masyarakat, kita sadari maupun tidak, masyarakat sering kali membentuk kelompok-kelompok lainnya. Secara umum, kelompok-kelompok tersebut kita bedakan menjadi dua. Mereka adalah kelompok 'Mayoritas' dan kelompok 'Minoritas'. Perbedaan kelompok ini terjadi berdasarkan gaya hidup, agama, keyakinan, kebudayaan, bahasa, asal-usul atau pun lainnya. Penggolongan tersebut mengakibatkan kekuasaan kelompok mayoritas lebih besar dari pada kelompok minoritas. Nantinya, kekuasaan itu secara tidak langsung dapat mengakibatkan tekanan kepada kelompok yang tidak atau kurang mempunyai kekuasaan, lalu membuatnya menjadi inferior.

Kelompok minoritas secara universal diartikan sebagai sekelompok orang yang berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok lainnya. Menurut definisi yang dikemukakan

³¹ M.D. La Ode, *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik: Politik Etnis Cina Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.1.

oleh Francesco Capotorti, minoritas adalah suatu kelompok yang secara numerik lebih rendah dari pada populasi penduduk, atau dengan kata lain berada diposisi yang tidak dominan.³² Dalam *Promoting and Protecting Minority Rights A Guide for Advocates*, menyatakan:

“The concepts of “minority” and “majority” are relatively recent in international law, although distinctions among communities have obviously existed throughout history. Some political systems did grant special community rights to their minorities, although this was not generally based on any recognition of minority “rights” per se.”

Bahwa Konsep "minoritas" dan "mayoritas" relatif baru dalam hukum internasional perbedaan di antara komunitas jelas ada sepanjang sejarah. Beberapa sistem politik memang memberikan hak komunitas khusus kepada minoritas mereka, meskipun ini umumnya tidak didasarkan pada setiap pengakuan hak.³³

Dalam buku yang berjudul *Teori Penurunan Kepastian: Sebuah Teori Komunikasi Antar Kelompok* karya Emeraldy Chatra, kaum mayoritas harus toleran kepada kaum minoritas, tetapi kaum minoritas tidak perlu toleran terhadap kaum mayoritas. Jika mayoritas berusaha menghalang-halangi minoritas untuk berkuasa, maka mayoritas akan disebut intoleran. Dan ketika

³² Office of the High Commissioner for Human Rights, *Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation*, (New York, 2010), h. 2.

³³ *Promoting and Protecting Minority Rights A Guide for Advocates*, (New York: United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, 2012), h.2.

faktanya minoritas menggunakan kekuatan yang mereka punyai, ekonomi misalnya, untuk mencederai mayoritas, hal itu tidak dapat disebut intoleran. Intoleran hanya hanya dari mayoritas kepada minoritas, tidak sebaliknya.³⁴

C. Kronologis Pilgub DKI Jakarta 2017

Arena kontestasi politik yang pernah hangat di perbincangkan oleh masyarakat ialah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dilansir dari kompas.com, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang mengatakan, banyak faktor yang menjadi alasan mengapa pemberitaan Pilkada DKI Jakarta di media *online* lebih mendominasi dibandingkan 100 daerah lain karena Jakarta, salah satunya Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sebagai Kota yang menjadi pusat perkembangan Negara, kemenangan dalam kontestasi Pilgub di DKI Jakarta kabarnya akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pada Pemilu periode selanjutnya.

Pilgub DKI Jakarta 2017 yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan 19 April 2017 ini guna menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjabat dalam periode 2017-2022. Dan pada tahun 2017 merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang ke-tiga bagi Jakarta dengan menggunakan sistem pencoblosan.

³⁴ Emerald Chatra, *Teori Penurunan Kepastian: Sebuah Teori Komunikasi Antar kelompok*, (Padang: Merawahijau Publishing, 2018), h.222.

Pada putaran pertama, gubernur petahana Basuki Tjahaya Purnama mencalonkan dirinya bersama Djarot Saiful Hidayat yang mengusung visi "Jakarta Sebagai Etalase Kota Indonesia yang Modern, Tertata Rapi, Manusiawi, dan Fokus pada Pembangunan Manusia Seutuhnya dengan Kepemimpinan yang Bersih, Transparan, dan Profesional." dengan jargon andalannya, "KERJA KERAS, KERJA HEBAT." Selain itu, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Sylviana Murni mantan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai visi "Menuju Jakarta Tahun 2022 Yang Lebih Maju, Aman, Adil & Sejahtera", sebagai pemilik jargon, "JAKARTA UNTUK RAKYAT." Lalu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Anies Baswedan juga mencalonkan diri bersama dengan Sandiaga Uno, dengan visi "Jakarta Kota Maju dan Beradab dengan Seluruh Warga Merasakan Keadilan dan Kesejahteraan" berjargon "JAKARTA MAJU BERSAMA." Kemudian pada putaran Kedua, kandidat calon gubernur dan wakil gubernur semakin mengerucut menjadi 2 kandidat, yaitu Basuki Tjahaya Purnama bersama Djarot Hidayat dan Anies Baswedan menggandeng Sandiaga Uno.

Debat pada putaran pertama, berhasil diselenggarakan tiga kali. *Pertama*, Jumat 13 Januari 2017 dengan topik mengenai Pembangunan Sosial Ekonomi Jakarta. Dengan stasiun televisi penyelenggara tvOne, Jawa Pos TV, dan NET. *Kedua*, Jumat 27 Januari 2017 membahas mengenai Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Dengan stasiun televisi penyelenggara MetroTV,

iNews TV, dan TVRI Jakarta & Banten. Kemudian, *ketiga*, Jumat 10 Februari 2017 mengenai Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta. Dengan stasiun televisi penyelenggara CNN Indonesia, SCTV, Kompas TV, dan Jakarta TV.

Selanjutnya, debat putaran kedua dilakukan Rabu tanggal 12 April 2017 mengangkat topik "Dari Masyarakat untuk Jakarta" dengan stasiun televisi penyelenggara CNN Indonesia, Kompas TV, SCTV, dan Jakarta TV.

Selain debat resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Provinsi DKI Jakarta, dalam perhelatan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 ini juga diadakan debat tidak resmi yang diselenggarakan oleh beberapa stasiun televisi swasta. Seperti Program acara Mata Najwa Eksklusif: Babak Final Pilkada Jakarta Metro TV, Rosi & Kandidat Pemimpin Jakarta (Putaran pertama dan kedua) Kompas TV, Jakarta Kece Net TV, dan forum-forum tidak resmi lainnya.